

**Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian bagi Warga Binaan
Pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang
(Studi Narapidana dengan Masa Tahanan Lebih dari 1 Tahun)**

Sulastri¹; Rita Myrna²; Neneng Weti Isnawaty³

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences

¹sulastrisz@gmail.com ; ²Myrna@unpad.ac.id ; ³nenengwety@gmail.com

ABSTRACT

THIS RESEARCH DISCUSSES ABOUT THE COLLABORATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE PERSONALITY DEVELOPMENT PROGRAM FOR CORRECTIONAL INMATES IN SUMEDANG REGENCY. THE PERSONALITY DEVELOPMENT PROGRAM FOR CORRECTIONAL INMATES IN SUMEDANG REGENCY IS AN EFFORT MADE BY THE LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUMEDANG TO FOSTER INMATES IN THE RELIGIOUS FIELD TO BECOME BETTER INDIVIDUALS. THE IMPLEMENTATION OF PERSONALITY DEVELOPMENT IS THE LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUMEDANG IN COLLABORATION WITH THE KEMENTERIAN AGAMA SUMEDANG. HOWEVER, IN ITS IMPLEMENTATION, PROBLEMS ARE STILL FOUND, INCLUDING IN COLLABORATIVE COMMUNICATION AND COLLABORATION RESOURCES. THE RESEARCH METHOD USED IN THIS STUDY IS A QUALITATIVE METHOD. WHILE THE THEORY USED AS GUIDANCE IN THIS RESEARCH IS THE THEORY OF COLLABORATION SUCCESS FACTORS PROPOSED BY MATTESICH AND MONSEY (1992) NAMELY THE COLLABORATION ENVIRONMENT, CHARACTERISTICS OF COLLABORATION MEMBERS, COLLABORATION PROCESSES, COLLABORATIVE COMMUNICATION, COLLABORATION GOALS AND COLLABORATION RESOURCES. THE RESULTS OF THIS STUDY INDICATE THAT COLLABORATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE PERSONALITY DEVELOPMENT PROGRAM FOR CORRECTIONAL INMATES IN SUMEDANG REGENCY HAS IN PRINCIPLE BEEN GOING WELL. THIS CAN BE SEEN FROM THE SIX SUCCESS FACTORS OF COLLABORATION ACCORDING TO MATTESICH AND MONSEY (1992) THAT ALMOST ALL OF THE SIX FACTORS WENT WELL. BUT THERE ARE STILL SOME FACTORS THAT HAVE NOT GONE WELL. FACTORS THAT HAVE BEEN GOING WELL ARE THE COLLABORATION ENVIRONMENT, THE CHARACTERISTICS OF THE COLLABORATION MEMBERS, THE COLLABORATION PROCESS AND THE COLLABORATION GOALS. WHILE THE SUCCESS FACTORS FOR COLLABORATION THAT HAVE NOT BEEN GOING WELL ARE COLLABORATION COMMUNICATION FACTORS AND COLLABORATION RESOURCES.

KEYWORDS: *COLLABORATION, PERSONALITY DEVELOPMENT PROGRAM, SUMEDANG.*

ABSTRAK

PENELITIAN INI MEMBAHAS TENTANG KOLABORASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI KABUPATEN SUMEDANG. PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI KABUPATEN SUMEDANG MERUPAKAN SUATU UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUMEDANG UNTUK MEMBINA NARAPIDANANYA DIBIDANG KEAGAMAAN AGAR MENJADI PRIBADI YANG LEBIH BAIK. PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN TERSEBUT LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUMEDANG BERKOLABORASI DENGAN KEMENTERIAN AGAMA SUMEDANG. NAMUN, DIDALAM PELAKSANAANNYA MASIH DITEMUKAN PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DIANTARANYA DALAM KOMUNIKASI KOLABORASI DAN SUMBER DAYA KOLABORASI. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN INI ADALAH METODE KUALITATIF. SEDANGKAN TEORI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI GUIDANCE DALAM PENELITIAN INI ADALAH TEORI FAKTOR KEBERHASILAN KOLABORASI YANG DIKEMUKAKAN OLEH MATTESICH DAN MONSEY (1992) YAITU LINGKUNGAN KOLABORASI, KARAKTERISTIK ANGGOTA KOLABORASI, PROSES KOLABORASI, KOMUNIKASI KOLABORASI, TUJUAN KOLABORASI DAN SUMBER DAYA KOLABORASI. HASIL PENELITIAN INI MENUNJUKKAN BAHWA KOLABORASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI KABUPATEN SUMEDANG PADA PRINSIPNYA SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK. HAL INI DAPAT DILIHAT DARI ENAM FAKTOR KEBERHASILAN KOLABORASI MENURUT MATTESICH DAN MONSEY (1992) BAHWASANNYA DARI KE ENAM FAKTOR TERSEBUT HAMPIR SEMUANYA BERJALAN DENGAN BAIK. TETAPI MASIH ADA BEBERAPA FAKTOR YANG BELUM BERJALAN DENGAN BAIK. FAKTOR YANG SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK YAITU LINGKUNGAN KOLABORASI, KARAKTERISTIK ANGGOTA KOLABORASI, PROSES KOLABORASI DAN TUJUAN KOLABORASI. SEDANGKAN FAKTOR KEBERHASILAN KOLABORASI YANG BELUM BERJALAN DENGAN BAIK ADALAH FAKTOR KOMUNIKASI KOLABORASI DAN SUMBER DAYA KOLABORASI.

KATA KUNCI: *KOLABORASI, PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN, SUMEDANG.*

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini tidak lagi menganut sistem kepenjaraan dalam menangani pemidanaan tetapi menggunakan sistem pemasyarakatan. Dalam hal ini terpidana tidak lagi dibuat jera dengan sistem kepenjaraan tetapi diberikan pembinaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi bagi warga binaan pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang mengatur tentang perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Akhir dari proses pemidanaan yaitu narapidana dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan. Seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 3 tertulis bahwa "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan". Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan merupakan sebutan bagi masyarakat yang mendapatkan sanksi dari tindakan kriminalitas atau tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan bertugas untuk membentuk warga binaan agar dapat menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat.

Didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 1 tertulis bahwa "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana". Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat 1 tertulis bahwa "Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan".

Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat di Kabupaten Sumedang yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 40, Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang dibagi menjadi tiga blok, yaitu blok Asahan untuk tahanan, blok Brantas untuk narapidana dan blok Citarum untuk narapidana yang menjadi tamping. Pada bulan Maret 2021 tercatat 194 warga binaan pemasyarakatan termasuk didalamnya terdapat 147 narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang. Penyebab masuknya mereka menjadi warga binaan pemasyarakatan disebabkan oleh berbagai macam kasus kejahatan seperti kasus perlindungan anak, narkoba, pencurian, terhadap ketertiban, penggelapan, penipuan, penganiayaan dan lain sebagainya. Jenis kejahatan narapidana yang paling banyak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang tersebut adalah kejahatan perlindungan anak, narkoba, dan pencurian.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang membina warga binaan pemasyarakatan melalui berbagai bentuk pembinaan sehingga kelak menjadi warga binaan pemasyarakatan yang memiliki pribadi lebih baik. Salah satu pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang yaitu pembinaan kepribadian. Bentuk kegiatan dalam pembinaan kepribadian ini menyangkut kegiatan keagamaan seperti belajar membaca iq'ro, al-qur'an, samrohan, akhlak dan tauhid. Kegiatan pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang tersebut dilakukan setiap hari Senin dan Kamis.

Fakta di lapangan, dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang yang dilakukan oleh bagian Sub Seksi Registrasi dan Bimkemas dalam melaksanakan pembinaan kepribadian tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang berkolaborasi dengan Kementerian Agama Sumedang. Namun dalam kolaborasi tersebut dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Berdasarkan peninjauan awal yang dilakukan peneliti, bahwasannya ditemukan indikasi masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang pada tahun 2020 bahwa masih terdapat narapidana yang sudah bebas masa tahannya kemudian

melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tindak kejahatan kembali, yang kemudian disebut sebagai residivis sebanyak 22 orang.

2. Berdasarkan wawancara awal bersama stakeholder terkait bahwa komunikasi antar anggota kelompok kolaboratif dalam kolaborasi tersebut belum berjalan dengan baik. Ditandai dengan komunikasi antar anggota kelompok kolaboratif dalam kolaborasi tersebut tidak dilakukan secara intensif.
3. Berdasarkan wawancara awal bersama stakeholder terkait bahwa ketersediaan sumber daya yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi masih terbatas. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber dana dan sumber daya manusianya. Dalam kolaborasi pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi narapidana di Kabupaten Sumedang muncul permasalahan pada sumber dana yang terbatas.
4. Berdasarkan wawancara awal bersama stakeholder terkait bahwa prasana yang menjadi penunjang dalam kolaborasi pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi narapidana di Kabupaten Sumedang masih terbatas. Hal ini ditandai dengan luasnya ruangan yang menjadi tempat pembinaan kepribadian relatif kecil yaitu hanya berukuran 10m x 15m.

Berdasarkan indikasi masalah yang sudah peneliti jelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Bagaimana Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian bagi Warga Binaan Masyarakat di Kabupaten Sumedang”. Dengan harapan dalam melakukan penelitian ini peneliti mampu menjawab masalah, bagaimana kolaborasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan masyarakat yang terjerumus dalam tindak kriminalitas/kejahatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna masalah sosial individu atau kelompok (Creswell, 2019:4). Metode penelitian kualitatif digunakan karena

permasalahan/isu yang diangkat membutuhkan sebuah eksplorasi. Sehingga eksplorasi ini dibutuhkan karena adanya kebutuhan untuk mempelajari suatu kelompok atau populasi tertentu, mengidentifikasi variabel-variabel yang tidak mudah untuk diukur. Selain itu, membutuhkan suatu pemahaman mendetail dan lengkap tentang permasalahan yang ada tersebut. Pemahaman yang detail ini hanya dapat diperoleh dengan berbicara secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan (Creswell, 2015:63-64).

Metode penelitian kualitatif ini relevan digunakan dengan penelitian yang dilakukan karena peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan bagaimana kolaborasi dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan masyarakat di Kabupaten Sumedang sehingga memerlukan eksplorasi, pemahaman yang lengkap dan detail tentang permasalahan tersebut. Data dan informasi yang diperoleh oleh peneliti adalah dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data kemudian peneliti mengolah data tersebut dan menganalisisnya agar bisa ditarik kesimpulan. Analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data yang sudah dianalisis kemudian diuji kredibilitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi digunakan oleh peneliti untuk menguji keabsahan data berdasarkan hasil wawancara untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.

PENELITIAN TERKAIT

Berdasarkan isu permasalahan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menurut peneliti mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan tentang isu yang sama yaitu tentang “kolaborasi” maupun “pembinaan narapidana” yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan perspektif yang berbeda. Peneliti bermaksud untuk melihat kemiripan dengan penelitian yang dilakukan, sebagai upaya menjaga orsinilitas dari penelitian yang dilakukan, serta menambah pengetahuan peneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian pertama, yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan adalah

penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas Erina Suhestia, Abd Yuli Andi Gani, dan Sukanto pada tahun 2013 yang berjudul Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Malang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia yang diberikan belum maksimal, karena masih terdapat banyak kendala dan peran serta instansi lain dan masyarakat sangat kurang (Ningtyas dkk, 2013).

Penelitian kedua, yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan adalah penelitian yang dilakukan oleh Karbono Kemaya pada tahun 2015 yang berjudul Kolaborasi Pandita dan Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dalam Membina Keagamaan Narapidana Budha. Penelitian ini membahas tentang Lapas yang bekerja sama dengan lembaga luar yakni, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) yang mengkoordinir para Romo Pandita dari berbagai majelis agama Budha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan belum ada kurikulumnya, evaluasi dilakukan secara lisan. Pelaksanaan pembinaan tersebut dipengaruhi oleh adanya faktor penghambat yang berasal dari internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya media pembinaan, tidak ada pelatih resmi agama Budha, kualitas dan variasi pembinaan, serta kurangnya motivasi narapidana. Sedangkan, faktor eksternal meliputi kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait baik instansi pemerintah maupun non pemerintah yang berkepentingan dengan pembinaan umat Budha, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembinaan (Karbono, 2015).

Penelitian ketiga, yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdulah Subagia pada tahun 2020 yang berjudul Implementasi Program Pembinaan untuk Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pegawai memiliki peran penting dalam dimensi organisasi meskipun, Lapas mengalami kekurangan pegawai, kurangnya fasilitas Lapas yang memadai, dan adanya kelebihan beban kerja pada Subseksi Registrasi Dan Bimbingan Kemasyarakatan (Regbimkemas) dan Subseksi Kegiatan Kerja (Giatja). Selain itu, Lapas juga melakukan berbagai kerjasama dengan pihak eksternal untuk penguatan materi pembinaan dan

memberdayakan anggota narapidana lain yang dianggap sudah senior untuk membantu dalam pembinaan. Namun dalam pelaksanaannya ketiadaan standar prosedur dalam pemberian materi, pengawasan dan evaluasi program menjadi penghambat dalam implementasi program untuk berlangsung secara optimal (Abdulah, 2020).

Dari ketiga penelitian terdahulu yang sudah peneliti uraikan diatas maka terdapat persamaan dan perbedaan masing-masing dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan orsinilitas dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti pun tetap terjaga. Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini berkaitan dengan program pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang yang berkolaborasi dengan instansi terkait dan dengan adanya indikasi masalah yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya.

HASIL DAN DISKUSI

Untuk memudahkan peneliti dalam membahas hasil penelitian maka peneliti melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang dengan menggunakan teori faktor keberhasilan kolaborasi menurut Mattesich dan Monsey (1992) terdiri dari 19 faktor yang dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok yaitu:

1. Lingkungan Kolaborasi
2. Karakteristik Anggota Kolaborasi
3. Proses Kolaborasi
4. Komunikasi Kolaborasi
5. Tujuan Kolaborasi
6. Sumber Daya Kolaborasi

Peneliti melakukan penelitian mengenai Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang berdasarkan keenam faktor keberhasilan diatas. Sehingga keenam faktor tersebut akan menjadi tolak ukur peneliti ketika akan memberikan kesimpulan apakah kolaborasi yang dilaksanakan tersebut sudah berhasil dan optimal atau tidak.

4.1 Lingkungan Kolaborasi

4.1.1 Sejarah Kolaborasi

Kolaborasi dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang dengan Kementerian Agama Sumedang sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya sehingga memudahkan dalam proses kolaborasi tersebut. Kolaborasi ini sudah berjalan sejak dulu bahkan dalam waktu 5 tahun terakhir ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang dengan Kementerian Agama Sumedang rutin melakukan kolaborasi. Dan hampir 3 kali pergantian kepemimpinan Kepala Kementerian Agama Sumedang sudah berjalan kolaborasi.

4.1.2 Kelompok Kolaborasi yang Dianggap sebagai Pemimpin

Terdapat berbagai cara yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang dengan Kementerian Agama Sumedang untuk mencapai tujuan dari adanya kolaborasi dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang yaitu dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang membagi warga binaan pemasyarakatan dan dibuat kelas-kelas. Kemudian dari pihak Kementerian Agama Sumedang menyiapkan siapa saja yang bersedia memberikan bimbingan dan memberikan penyuluhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang. Selain itu, perihal tempat juga menjadi bahan pembicaraan dan materi-materi apa saja yang paling cocok disampaikan.

4.1.3 Iklim Politik atau Sosial yang Menguntungkan

Lingkungan dimana tempat kolaborasi itu berada yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang dan Kementerian Agama Sumedang sangat mendukung dengan adanya kolaborasi dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang. Selain itu, dari sisi kebijakan Kementerian Agama Sumedang pun mendukung apa yang sedang dilaksanakan mulai dari menyiapkan penyuluh kemudian penjadwalan. Bahkan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang meminta secara aktif agar jadwal yang ada tersebut jangan sampai ada yang bolong atau kosong.

4.2 Karakteristik Anggota Kolaborasi

4.2.1 Saling Menghormati, Memahami dan Percaya

Kolaborasi dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang setiap anggota yang terlibat dalam kolaborasi tersebut mempunyai sikap saling menghormati, memahami dan percaya satu sama lain baik setiap anggota dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang maupun dari pihak Kementerian Agama Sumedang. Setiap anggota kelompok kolaborasi harus berdampingan karena kolaborasi yang baik tercipta dengan adanya saling menghormati, memahami dan percaya satu sama lain.

4.2.2 Golongan Anggota yang Tepat

Golongan anggota yang terlibat kolaborasi dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang baik dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang maupun Kementerian Agama Sumedang merupakan golongan anggota yang tepat dalam kolaborasi tersebut. Setiap anggota kelompok kolaborasi memahami tugas dan fungsinya masing-masing sehingga dalam pelaksanaannya pun sudah terlaksanakan dengan baik dan lancar. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang mempunyai tugas untuk membina narapidana melalui bagian Binadik dan Giatja. Kemudian Kementerian Agama Sumedang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan keagamaan di lembaga-lembaga negara, masyarakat dan lain sebagainya melalui bagian Bimbingan Masyarakat Islam.

4.2.3 Anggota Berkolaborasi Seperti dalam Kepentingan Sendiri

Setiap anggota kelompok kolaborasi dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang menganggap bahwa kepentingan dalam kolaborasi ini seperti kepentingan sendiri yang sama pentingnya bahkan sangat penting diantara kepentingan-kepentingan yang lainnya. Anggota kelompok kolaborasi menganggap bahwa kepentingan dalam kolaborasi ini merupakan kepentingan bersama, nusa bangsa dan agama yang tentu saja menjadi kepentingan diatas kepentingan sendiri/pribadi. Ketika ada kepentingan yang lain seperti tugas diluar lingkungan kolaborasi maka kepentingan tersebut lebih baik ditinggalkan.

4.2.4 Kemampuan Berkompromi

Setiap anggota kelompok kolaborasi dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang memiliki kemampuan dalam berkompromi. Ketika penyuluh dari Kementerian Agama Sumedang tidak bisa hadir pada waktunya kemudian dikompromikan dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang dan dicari solusinya bersama-sama. Selain itu, materi-materi yang akan diberikan pun selalu dikompromikan bersama antara Kementerian Agama Sumedang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang. Materi-materi tersebut tentunya merupakan materi yang benar-benar dibutuhkan untuk warga binaan pemasyarakatan.

4.3 Proses Kolaborasi

4.3.1 Anggota Berbagi Kepentingan Baik dalam Proses maupun Hasil

Setiap anggota kelompok kolaborasi dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang berbagi kepentingan baik dalam proses maupun hasil. Hal ini dibuktikan dengan adanya evaluasi dan perencanaan lanjutan untuk di tahun berikutnya. Evaluasi ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana proses pelaksanaan pembinaan tersebut, bagaimana hasilnya, dan apa yang menjadi kekurangannya. Sehingga pada kegiatan berikutnya bisa diperbaiki dan bisa lebih baik lagi.

4.3.2 Banyak Lapisan Terlibat dalam Pengambilan Keputusan

Kolaborasi dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang tidak semua terlibat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan biasanya berada di pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang sebagai leading sector dalam kolaborasi tersebut. Namun hasil dari keputusan tersebut tetap dimusyawarahkan dan disampaikan kepada Kementerian Agama Sumedang dan penyuluh. Tetapi di beberapa kasus ada pula melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan seperti dalam pengambilan keputusan untuk diadakannya pesantren di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang.

4.3.3 Fleksibilitas

Setiap anggota kelompok kolaborasi dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang memiliki fleksibilitas dan terbuka satu-sama lain dalam proses kolaborasi. Hanya saja dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan kepada Kementerian Agama Sumedang misalnya warga binaan pemasyarakatan dengan kasus-kasus tertentu. Hal itu pun dimaklumi oleh Kementerian Agama Sumedang karena menyangkut kebijakan yang sudah ada dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang.

4.3.4 Pengembangan Peran yang Jelas dan Pedoman Kebijakan

Kolaborasi dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang sudah memahami dengan jelas tentang peran, hak dan tanggung jawab masing-masing. Peran, hak dan tanggung jawab setiap anggota dalam kolaborasi ini sudah dibahas pada awal dimulainya kolaborasi. Dan tentunya peran, hak dan tanggung jawab dari setiap anggota dalam kelompok kolaborasi ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu juga memiliki pedoman kebijakan yang jelas tentang pembinaan narapidana yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

4.3.5 Adaptasi

Setiap anggota kelompok kolaborasi dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang mampu adaptasi dalam berbagai situasi. Meskipun, pada awalnya memang dari pihak Kementerian Agama Sumedang khususnya para penyuluh yang datang memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan merasa tidak nyaman, dan khawatir masuk Lembaga Pemasyarakatan karena berhadapan dengan manusia-manusia yang pernah melakukan kejahatan.

4.4 Komunikasi Kolaborasi

4.4.1 Membangun Hubungan Komunikasi Formal dan Informal

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sumedang dan Kementerian Agama Sumedang dalam kolaborasi pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemsarakatan di Kabupaten Sumedang mampu membangun komunikasi secara formal dan informal dalam kolaborasi tersebut. Kedua komunikasi baik secara formal maupun informal sudah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sumedang dan Kementerian Agama Sumedang. Namun, komunikasi secara informal lebih sering dilaksanakan yaitu minimalnya 1 minggu 1 kali. Sedangkan komunikasi secara formal yang hanya dilaksanakan 1 tahun 1 kali. Komunikasi formal ini pun pada tahun 2020 dan tahun sekarang belum dilaksanakan kembali karena situasi kondisi saat ini masih pandemi Covid-19.

4.4.2 Komunikasi yang Terbuka dan Sering

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sumedang dan Kementerian Agama Sumedang dalam kolaborasi pelaksanaan program pembinaan bagi warga binaan pemsarakatan di Kabupaten Sumedang komunikasi yang dilaksanakan yaitu secara terbuka. Komunikasi yang paling sering dilakukan adalah komunikasi secara informal yang minimalnya melakukan komunikasi 1 minggu 1 kali setiap hari Jumat baik melalui telepon maupun bertemu tatap muka. Namun untuk komunikasi secara formal jarang dilaksanakan yang hanya dilaksanakan 1 tahun 1 kali.

4.5 Tujuan Kolaborasi

4.5.1 Tujuan dan Sasaran yang Konkrit dan Dapat Dicapai

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sumedang dan Kementerian Agama Sumedang dalam kolaborasi pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemsarakatan di Kabupaten Sumedang mempunyai tujuan dan sasaran tertentu. Tujuannya adalah untuk membuat narapidana menyesali perbuatannya, tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum kembali dan mempunyai dasar/pegangan agama islam yang bagus seperti yang awalnya tidak bisa

baca Iqra menjadi pandai dalam membaca Iqra, Alquran, dan bisa membedakan mana yang benar atau salah. Namun berdasarkan data yang ada di lapangan, pada bulan Juli 2021 masih terdapat residivis sebanyak 46 orang.

4.5.2 Visi Bersama

Kolaborasi dalam melaksanakan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemsarakatan di Kabupaten Sumedang mempunyai visi bersama. Tanpa adanya visi bersama dalam kolaborasi tersebut maka tidak akan bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dari program yang dilaksanakan. Kolaborasi tersebut mempunyai visi bersama yaitu memperbaiki warga binaan pemsarakatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sumedang khususnya memperbaiki dari sisi keagamaannya sehingga mempunyai iman yang kuat dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum kembali.

4.5.3 Tujuan yang Menarik

Tujuan kolaborasi dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemsarakatan adalah untuk membuat narapidana menyesali perbuatannya, tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum kembali dan mempunyai dasar/pegangan agama islam yang bagus sehingga mampu mencetak para ustad merupakan tujuan yang menarik. Dimana disini warga binaan pemsarakatan setelah bebas masa tahanannya dan kembali ke masyarakat bisa diterima kembali oleh masyarakat dan bahkan bisa mengamalkan juga ilmu yang didapatnya selama berada di Lembaga Pemasarakatan.

4.6 Sumber Daya Kolaborasi

4.6.1 Dana yang Cukup

Kolaborasi dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemsarakatan di Kabupaten Sumedang sumber pendanaannya berasal dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Lapas Kelas IIB Sumedang untuk pembinaan kepribadian yaitu sekitar Rp 28.000.000. Selain itu pedanaan pun berasal dari dari Kementerian Agama Sumedang melalui sumbangan dari BAZNAS Sumedang. Dana yang ada tersebut digunakan untuk melaksanakan pembinaan kepribadian kepada warga binaan pemsarakat dimulai dari membayar transportasi

penyuluh, untuk baju koko, untuk kopiah, dan untuk papan belajar. Dengan banyaknya keperluan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pembinaan kepribadian tersebut, oleh karena itu pendanaan yang ada masih kurang. Selain itu untuk membayar transportasi penyuluh pun dirasa masih kurang.

4.6.2 Penyelenggara yang Terampil

Kolaborasi dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang dari segi kualitas penyelenggara mempunyai penyelenggara yang sangat terampil sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sedangkan dari segi kuantitas penyelenggara, di salah satu kegiatan yang dilakukan mempunyai penyelenggara yang kurang. Namun kurang adanya penyelenggara ini sebenarnya dikarenakan jumlah pendanaan yang sebelumnya pun masih kurang. Jika pendanaan memadai bisa saja ditambah kuantitas dari penyelenggara kegiatan tersebut, sehingga bisa mencukupi. Namun karena pendanaannya pun minim pada akhirnya penyelenggara disini dirasakan kurang. Padahal masih banyak penyelenggara-penyelenggara yang bisa diberdayakan.

KESIMPULAN

Program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang untuk membina narapidananya dibidang keagamaan agar menjadi pribadi yang lebih baik, mempunyai akhlak/budi pekerti yang baik, tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum kembali serta dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam memberikan pembinaan kepribadian tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang memiliki keterbatasan-keterbatasan oleh karena itu program tersebut berkolaborasi dengan instansi terkait yaitu Kementerian Agama Sumedang.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti uraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kolaborasi dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIB Sumedang dengan Kementerian Agama Sumedang pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari enam faktor keberhasilan kolaborasi menurut Mattesich dan Monsey (1992) bahwasannya dari ke enam faktor tersebut hampir semuanya berjalan dengan baik. Tetapi masih ada beberapa faktor yang belum berjalan dengan baik.

Dari ke enam faktor keberhasilan kolaborasi menurut Mattesich dan Monsey (1992) yang sudah berjalan dengan baik yaitu faktor lingkungan kolaborasi, karakteristik anggota kolaborasi, proses kolaborasi dan tujuan kolaborasi. Sedangkan faktor keberhasilan kolaborasi yang belum berjalan dengan baik adalah faktor komunikasi kolaborasi dan sumber daya kolaborasi.

REFERENSI

- Abdulah, S. (2020). Implementasi Program Pembinaan untuk Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang. 1–111.
- Creswell, J. W. (2019). RESEARCH DESIGN : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (4th ed.). PUSTAKA PELAJAR.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset (I). PUSTAKA PELAJAR.
- Mattesich, Paul W: Monsey, B. R. (1992). Collaboration: What Makes It Work: A Review of Research Literature on Factors Influencing Successful Collaboration (2nd ed.). Amherst H Wilder Foundation.
- Ningtyas, Erina Suhestia : Gani, A. Y. : S. (2013). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Malang). Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 1(6), 1266–1275.
- Karbono, K. (2015). Kolaborasi Pandita dan LAPAS Kelas IIA Pemuda Tanggerang dalam Membina Keagamaan Narapidana Budha. Jurnal SMART, 01(3), 191–202.
- Presiden Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.1–42.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan. 1-19.